



Buletin Parlementaria



3 Kolaborasi
Atasi Krisis
Air Bersih



4 RUU
Keimigrasian
Resmi Sah
Jadi UU



Perekaman
E-KTP Bagi
Pemilih Pemula



Pertimbangkan
Aspek Ekonomi dan
Sosial



Nomor 1312/V/IX/2024 September 2024



9 772614 339005



Target Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,2%

Di bidang penganggaran, DPR RI punya perhatian lebih agar target penerimaan dan belanja negara mampu secara maksimal berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin pada melewati proses pembahasan sejak pertengahan tahun 2024, Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang disepakati untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini diberikan melalui rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/9) di Senayan, Jakarta.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus selaku pimpinan sidang yang disambut oleh pemberian persetujuan dari anggota dewan yang hadir.

Merujuk pada Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat I/ pembahasan



Ketua Banggar DPR RI dan Menteri Keuangan RI.

RUU APBN 2025, dipaparkan kesepakatan DPRRI dan pemerintah terhadap target asumsi makro antara lain; target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan laju inflasi yang ditetapkan pada 2,5%. Dalam laporan yang

disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah tersebut ditekankan pentingnya menjaga inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangat besar. Kesuksesan pemerintah menjaga inflasi rendah selama ini patut kita apresiasi. Namun kewaspadaan perlu kita jaga terhadap gejolak harga pangan dan energi yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi,” ujar Said saat membacakan laporannya.

Dalam pembahasan RUU APBN 2025, Badan Anggaran DPR juga mendorong agar tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditetapkan di angka 7% atau yang lebih rendah dari usulan pemerintah di level 7,1%. — **aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Kolaborasi Atasi Krisis Air Bersih



Ketua DPR RI Puan Maharani.

FOTO: JKA/PDT

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong Pemerintah untuk mempercepat upaya penanganan krisis air bersih di berbagai wilayah Indonesia dengan mengintensifkan kolaborasi lintas sektor. Puan mengajak Pemerintah untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.

termasuk sektor swasta, LSM, dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang air bersih, guna mempercepat distribusi dan penyediaan fasilitas air bersih, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

“Langkah-langkah ini harus dilakukan secara simultan untuk mengurangi risiko jangka panjang. Respons cepat

dari Pemerintah, khususnya Pemda, sangat diharapkan agar kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih dapat terpenuhi,” ujar Puan, Rabu (11/9).

Tidak hanya itu, Puan juga menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan kesehatan bagi warga yang terdampak kemarau panjang. Ia meminta Pemerintah untuk memberikan informasi mengenai bahaya penggunaan air yang terkontaminasi serta pentingnya menjaga sanitasi.

“Edukasi dan penyuluhan ini harus beriringan dengan solusi dan antisipasi yang telah dilakukan Pemerintah,” tegasnya.

— ssb/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arindyia, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danurtirto, A.Md,
Andi Nurul Naupal Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom.,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom.,
Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi
Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani,
Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie,
Balggsy Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien,
Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno P.D. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Gerardi Opiya,
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjannah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.
Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

RUU Keimigrasian Resmi Sah Jadi UU

DPR RI bersepakat untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Atas kesepakatan tersebut, maka RUU Keimigrasian Sah menjadi Undang-undang.

“Sidang dewan yang terhormat berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus yang diikuti dengan seruan persetujuan dari para anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Sebelumnya, sesuai dengan penugasan, Badan Legislasi telah melakukan pembahasan mengenai



FOTO: JKA/PDT

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus yang diikuti dengan seruan persetujuan dari para anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

RUU Keimigrasian tersebut bersama pemerintah melalui rapat-rapat secara

intensif, detil, dan cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dan berdasarkan Rapat Kerja pada tanggal 11 September 2024, pada keputusan Pembicaraan Tingkat I di Baleg, sembilan fraksi menerima dan menyetujui.

Adapun terkait dengan hasil pembahasan mengenai RUU keimigrasian, telah disepakati sembilan angka perubahan secara garis besar yakni, terdapat perubahan substansi pada konsiderans menimbang. Serta, penambahan substansi baru Pasal 3 ayat 4 terkait Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **gal/aha**

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT BERIKUTNYA KAMI AKAN MENANYAKAN SEKALI LAGI KEPADA SELURUH ANGGOTA, APAKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAPAT DISETUJUI UNTUK DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG?

Lodewijk Freidrich Paulus

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (KORPOLKAM)

Scan QR untuk berita selengkapnya

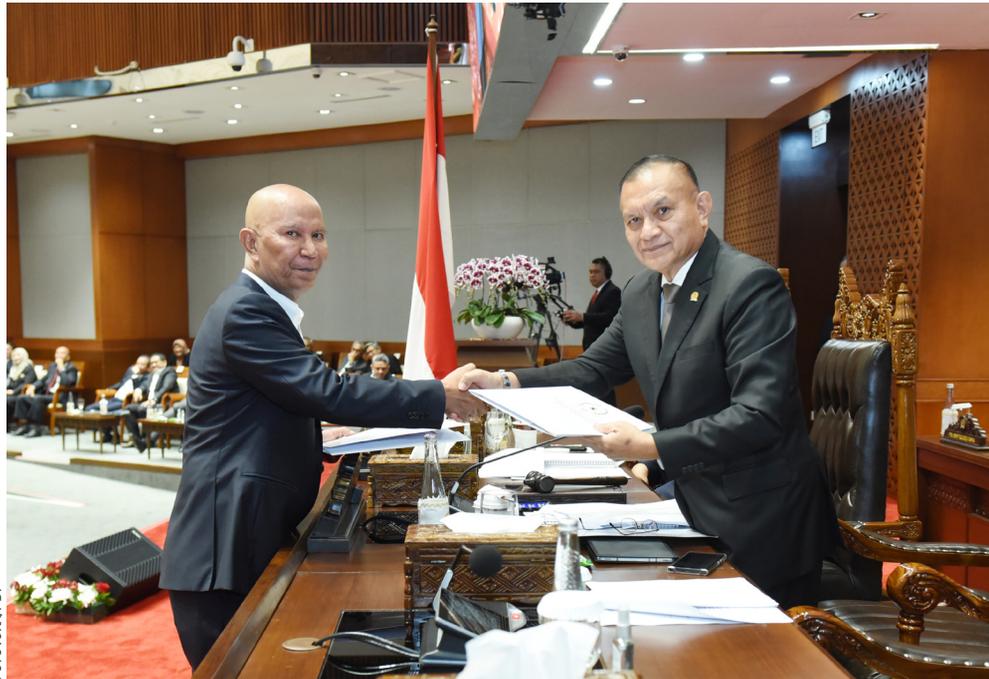


Catatan Target Indikator Kesejahteraan

Dalam penjelasan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, termaktub bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan refleksi dari salah satu fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu fungsi distribusi.

Mengingat bahwa APBN 2025 merupakan perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan sejumlah target indikator kesejahteraan. Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia kedepan.

“Pemerintah perlu mewaspadi gelombang pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi sepanjang Januari-Juni 2024 sebanyak 32.064 pekerja, dan hampir separuhnya di sektor tekstil. Tren pengangguran juga meningkat



Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah saat Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

pada kelompok pekerja paruh waktu, dari tahun lalu sebesar 6,91 persen

menjadi 8,52 persen di Februari 2024,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat membacakan laporannya pada Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Dalam Laporan Banggar mengenai hasil pembicaraan Tingkat I/ pembahasan RUU APBN 2025 yang disampaikan oleh Ketua Banggar dipaparkan beberapa catatan atas indikator kesejahteraan yang telah disepakati. Pada RUU APBN 2025 tercantum target Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada kisaran 4,5-5,0%. Banggar meminta pemerintah mewaspadi potensi adanya gelombang pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja pada sejumlah sektor. **uc/rdn**

PADA RUU APBN 2025 TERCANTUM TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERADA PADA KISARAN 4,5-5,0%. BANGGAR MEMINTA PEMERINTAH MEWASPADI POTENSI ADANYA GELOMBANG PENGANGGURAN AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA SEJUMLAH SEKTOR.

Said Abdullah

Ketua Badan Anggaran DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Rekam Jejak Anggota Watimpres Harus Bersih

DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengenai Dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (19/9) di Senayan, Jakarta.

Melalui agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan pertimbangan Presiden, dibahas pula penyempurnaan pasal 8G yang terkait dengan rekam jejak hukum bagi anggota Watimpres.

“Berdasarkan laporan ketua Badan Legislasi terdapat usulan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan pertimbangan Presiden dan perlu kami beritahukan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 12 September 2024 telah menyetujui usulan penyempurnaan Rancangan



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang dewan pertimbangan Presiden akan diputuskan dalam rapat paripurna tanggal 19 September 2024,” tutur Wakil ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus selaku pimpinan rapat.

Merujuk pada Tata tertib DPR RI pasal 256 ayat 2 yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, Lodewijk pun meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota yang hadir terkait dengan penyempurnaan pada pasal 8G tersebut.

Termaktub pada rumusan RUU tersebut, Pasal 8 huruf g semula tercantum; “tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan penyempurnaan yang diusulkan untuk Pasal 8 huruf g adalah; “tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”



SEDANGKAN PENYEMPURNAAN YANG DIUSULKAN UNTUK PASAL 8 HURUF G ADALAH; “TIDAK PERNAH DIANCAM ATAU DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.

Lodewijk Freidrich Paulus

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (KORPOLKAM)



Scan QR untuk berita selengkapnya



uc/aha

Dua Pesepak Bola Jadi WNI

Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/9) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menyetujui pemberian Kewarganegaraan Indonesia bagi Eliano Johannes Rejinder dan Mees Victor Joseph Hilgers. Eliano dan Mees Victor merupakan dua pemain sepak bola keturunan Indonesia.

Naturalisasi keduanya sebelumnya dituangkan dalam rekomendasi Presiden melalui Surat Presiden Nomor R-47/Pres/09/2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Eliano Johannes Rejinder dan Mees Victor Joseph Hilgers. Yang kemudian dibahas dan telah disetujui oleh Komisi X dan Komisi III DPR RI.

Eliano dan Mees Victor diharapkan dapat memperkuat Timnas dalam ajang internasional. Kedua



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).



ELIANO DAN MESS VICTOR DIHARAPKAN DAPAT MEMPERKUAT TIMNAS DALAM AJANG INTERNASIONAL. KEDUA PEMAIN INI AKAN BERPERAN PENTING DALAM KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2026 DAN PIALA ASIA 2027 YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI TARGET JANGKA PENDEK INDONESIA. UNTUK JANGKA PANJANG, NATURALISASI INI DIHARAPKAN DAPAT MEMBAWA TIMNAS INDONESIA MENCAPI PERINGKAT 100 BESAR DUNIA ATAU 10 BESAR DI ASIA.

Lodewijk Freidrich Paulus

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (KORPOLKAM)

pemain ini akan berperan penting dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 yang merupakan bagian dari target jangka pendek Indonesia. Untuk jangka panjang, naturalisasi ini diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia mencapai peringkat 100 besar dunia atau 10 besar di Asia.

Sebagai informasi, Eliano Johannes Rejinder (23) merupakan pemain sepak bola yang serba bisa. Performanya dinilai konsisten baik sepanjang 4 tahun terakhir selama berkarir di liga utama sepak bola profesional di Belanda. Selain itu, Mees Victor Joseph Hilgers (23) merupakan pemain yang memperoleh sorotan pelatih Shin Tae Yong sejak momen Piala Dunia FIFA U20 Tahun 2021. **bia/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



RUU Kementerian Negara sebagai UU



FOTO: MUN/PDT

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus yang diikuti dengan seruan persetujuan dari para anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/09/2024).

DPR RI menyetujui hasil penyempurnaan rumusan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Atas kesepakatan tersebut, maka revisi RUU Kementerian telah sah menjadi undang-undang.

"Sidang dewan yang terhormat, berikut kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus yang diikuti dengan seruan persetujuan dari para anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan terdapat enam angka perubahan yang telah disepakati dalam laporan Badan Legislasi atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan

atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Salah satunya, penyisipan Pasal 6A terkait pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada sub-urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan.

Lalu, penyisipan Pasal 9A terkait penulisan, pencantuman, dan/atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, penghapusan penjelasan Pasal 10 sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. [gal/rdn](https://www.gal.rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



PAW KPU Periode 2022-2027 Ditetapkan



FOTO : YGA/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani foto bersama se usai menanyakan persetujuan terhadap hasil laporan Komisi II DPR RI atas penetapan PAW Anggota KPU RI kepada anggota dewan yang hadir di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/09/2024).

DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan Tahun 2022-2027 terhadap Iffa Rosita.

“Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon PAW anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, amanah dan profesional,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani se usai menanyakan persetujuan terhadap hasil laporan Komisi II DPR RI atas

penetapan PAW Anggota KPU RI kepada anggota dewan yang hadir di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Diketahui, dasar pergantian ini dilakukan berdasarkan Keputusan DKPP RI tanggal 3 Juli 2024 yang telah menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asy’ari selaku Ketua dan anggota KPU masa jabatan 2022-2027 karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 Pasal 37 menyatakan apabila terdapat anggota KPU yang diberhentikan maka digantikan oleh

calon Anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh DPR RI.

“Oleh karena itu berdasarkan urutan ke-8 yang berhak menggantikan Saudara Hasyim Asy’ari adalah Saudara Viryan, sudah meninggal dunia, maka berdasarkan nomor urutan peringkat berikutnya lagi yaitu urutan ke-9 yang berhak menggantikan yaitu Saudari Iffa Rosita,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli saat membacakan laporan Komisi II terhadap PAW Anggota KPU RI Masa Jabatan 2022-2027.

gal/rdn



Tolak Usulan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA



Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

FOTO : JKA/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menyetujui seluruh usulan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024 yang terdiri dari 12 calon anggota. Hal itu disampaikan ketika memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025.

“Sidang dewan yang kami hormati, sekarang kami akan menanyakan sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III yang tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim Ad Hoc

HAM pada Mahka-mah Agung tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?” ungkap Puan dalam rapat di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9).

Sebelumnya, Komisi III DPR RI Dalam laporannya menyepakati untuk menolak secara keseluruhan 12 usulan calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM Mahkamah Agung (MA) RI untuk menjalani *fit and proper test*. Hal ini menindaklanjuti temuan dua calon hakim agung karier yang tak sesuai dengan persyaratan pengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim,

termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi.

Adapun persyaratan tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu berpengalaman paling sedikit 20 tahun. Selain itu, dua orang yang merupakan calon hakim agung pada kamar tata usaha negara khusus pajak, yakni Hari Sih Advianto yang baru menjadi hakim sejak 2016, dan Tri Hidayat Wahyudi sejak 2010.

— hal/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



DPR Setujui 5 Anggota BPK 2024-2029



Ketua DPR RI Puan Maharani foto bersama calon anggota BPK RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (10/9/2024) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. FOTO : AFR/PDT

DPR RI melalui Rapat Paripurna memberikan persetujuan pada lima nama Calon Anggota Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI masa jabatan 2024-2029 terpilih menjadi Anggota BPK periode terbaru. Mana-mana calon anggota BPK RI tersebut merupakan hasil dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI DPR RI pada 2-4 September 2024 silam.

“Sidang dewan yang kami hormati sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI

DPR RI terhadap hasil uji kelayakan, *fit and proper test* calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna DPR RI pada Selasa (10/9) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Disambut dengan seruan persetujuan dari anggota dewan yang hadir, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut langsung menyetujui palu sidang tanda disetujuinya laporan Komisi XI DPR RI sekaligus memberikan persetujuan pada lima nama Calon Anggota BPK RI yang diajukan.

“Sekali lagi pimpinan dewan

mengucapkan selamat kepada calon anggota BPK RI periode 2024-2029. Semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah,” lanjut Puan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P membacakan Laporan Hasil Pembahasan Uji Keapatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK RI dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dari laporan tersebut, rangkaian seleksi calon anggota BPK RI telah dimulai pada 10 Juni 2024 dengan penugasan kepada Komisi XI DPR RI terkait rangkaian pemilihan calon anggota BPK RI.

uc/aha



Utut Adianto Usul Komisi I Bentuk Panja Aset TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, menyampaikan perlunya pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk Aset TNI. Menurutnya, Panja tersebut bertujuan untuk mengawasi dan memperbaiki pengelolaan aset yang dimiliki oleh TNI, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta yang menjadi cakupan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/ Diponegoro.

Hal tersebut terungkap saat Tim Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kodam IV/Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (20/9). Dalam kunjungan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk mengenai pengelolaan aset Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang di bawah tanggung jawab Kodam. "Aset-aset ini harus dikelola dengan baik, sehingga penggunaannya bisa optimal bagi pertahanan negara," ungkap Utut.

Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, Kodam IV/Diponegoro sendiri memiliki sejumlah aset strategis, termasuk lahan-lahan yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa di antaranya disebut memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kodam IV/Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (20/9/2024).

demi kepentingan pertahanan, namun sebagian juga rentan terhadap sengketa lahan dengan pihak lain.

"Dengan dibentuknya Panja, kami berharap dapat ditemukan solusi konkret terkait persoalan aset, serta memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan nasional," pungkash Utut.

Selain membahas aset, Komisi

I juga mendiskusikan peningkatan kesejahteraan prajurit dan kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, baik di wilayah Jawa Tengah maupun secara nasional. Kunjungan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan DPR dalam upaya mendukung peran strategis TNI dan memastikan mereka memiliki sarana yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. — blf/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Jelang Pilkada Serentak, Kunjungi Binda Yogyakarta

Komisi I DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke BIN Daerah (Binda) Provinsi DIY. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Kunker Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini dilaksanakan guna menyambut Pilkada Serentak di Wilayah Provinsi DIY yang akan diselenggarakan pada November 2024 mendatang.

“Hal ini tentunya tidak hanya relevan, tetapi juga sangat mendesak mengingat tantangan yang kita hadapi menjelang Pilkada Serentak 2024,” ungkap Sturman kepada **Parlementaria** usai pertemuan di Yogyakarta, Jumat (20/9).

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa di era digital ini, ancaman terhadap demokrasi kita semakin kompleks. Terlebih, hoaks dan disinformasi menyebar dengan cepat melalui media sosial dan berpotensi memecah belah masyarakat maupun mengancam integritas proses Pilkada yang akan berlangsung.



Ketua Tim Kunker Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke BIN Daerah (Binda) Provinsi DIY di Yogyakarta, Jumat (20/9/2024).



DENGAN POPULASI MAHASISWA YANG BESAR DAN KERAGAMAN LATAR BELAKANG PENDUDUKNYA, YOGYAKARTA MENJADI CERMINAN MINI INDONESIA YANG HARUS KITA JAGA BERSAMA.



Sturman Panjaitan

Ketua Tim Kunker Komisi I DPR RI

“Dengan populasi mahasiswa yang besar dan keragaman latar belakang penduduknya, Yogyakarta menjadi cerminan mini Indonesia yang harus kita jaga bersama,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Di akhir, ia mengungkapkan bahwa hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi masukan komisi I DPR RI dalam merumuskan kebijakan mendatang. “Terkait bidang intelijen melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,” tutupnya.

hal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perekaman E-KTP Bagi Pemilih Pemula

Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memfasilitasi pelaksanaan perekaman E-KTP kepada Pemilih Pemula. Supaya masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) jelang Pilkada Serentak November 2024.

“Perekaman E-KTP bagi pemilih pemula menjadi hal penting. Selain sudah memiliki hak untuk memilih dalam pilkada, juga untuk menghindari adanya masalah sebagai warga negara agar hak pilihnya terpenuhi,” ungkap Haeny saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/9).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan sejauh mana proses perekaman E-KTP bagi pemilih pemula di Kabupaten Bekasi. Selain itu, dirinya juga mendorong Pemkab dan KPU Kabupaten Bekasi mengidentifikasi pemilih belum berusia 17 tahun tapi



Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/9/2024).

sudah/pernah menikah.

“Pemilih belum berumur 17 tahun

tapi sudah/pernah menikah juga bisa memilih sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68, yakni warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih,” tandas Haeny.

Legislator Dapil Jawa Timur IX ini juga menekankan agar KPU Kabupaten Bekasi selalu meng-*update* data DPT tambahan khususnya difable tuna netra, karena desain kertas surat suaranya berbeda. “Harus dipastikan apakah di Bekasi ini hasil Coklit-nya terutama DPT difable tuna netra sudah sesuai, karena ini menyangkut ketersediaan surat suara yang didesain khusus bagi para pemilih tuna netra,” tutupnya. **oji/rdn**

AGAR KPU KABUPATEN BEKASI SELALU MENG-UPDATE DATA DPT TAMBAHAN KHUSUSNYA DIFABLE TUNA NETRA, KARENA DESAIN KERTAS SURAT SUARANYA BERBEDA. “HARUS DIPASTIKAN APAKAH DI BEKASI INI HASIL COKLIT-NYA TERUTAMA DPT DIFABLE TUNA NETRA SUDAH SESUAI, KARENA INI MENYANGKUT KETERSEDIAAN SURAT SUARA YANG DIDESAIN KHUSUS BAGI PARA PEMILIH TUNA NETRA,”

Haeny Relawati

Anggota Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Reforma Agraria Hadirkan Keadilan bagi Masyarakat

Anggota Komisi II DPR RI Ongku Hasibuan menyoroti soal perkembangan pelaksanaan reforma agraria di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Menurutnya, khusus pelaksanaan reforma agraria di Kota Bogor petanya sudah lengkap. Sehingga, dari sisi pertanahan, Bogor memiliki status Kota Lengkap yang berarti pemetaan tanahnya sudah terdaftar keseluruhan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Karena mungkin kota ini kan kompak ya semuanya sudah sudah padat, jadi *nggak* ada reforma agraria,” ungkap Ongku usai Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/9). Sementara, ia menilai untuk reforma agraria di Kabupaten Bogor masih dilakukan secara bertahap.

“Khusus Kabupaten Bogor itu tadi



FOTO: YSM/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Ongku Hasibuan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/9/2024).



DARI 400 HEKTAR OBJEK REFORMA AGRARIA YANG DIUSULKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 1, YANG DISETUJUI HANYA 10 HEKTAR. SEDANGKAN DARI 2.200 HEKTAR OBJEK REFORMA AGRARIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 2, BARU DISETUJUI 48,8 HEKTAR.

Ongku Hasibuan
Anggota Komisi II DPR RI

ada (reforma agraria) ya, disebutkan bahwa untuk (Kantor Pertanahan Bogor 1 dan Bogor 2 itu ada 2.600 hektar yang diusulkan untuk menjadi objek reforma agraria di Kabupaten Bogor, yaitu 2200 hektar di antaranya itu ada di bawah naungan Kantor Pertanahan Bogor 2 itu meliputi Jonggol, Cariu dan sebagainya itu ya. Nah sementara di Bogor 1 itu berarti sekitar 400 hektar saja,” lanjutnya.

Ongku menyayangkan dari 400 hektar objek reforma agraria yang diusulkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, yang disetujui hanya 10 hektar. Sedangkan dari 2.200 hektar objek reforma agraria di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 2, baru disetujui 48,8 hektar. Ia menyoroti hal tersebut dapat terjadi karena adanya kewajiban mempertahankan kawasan hutan 30 persen dalam satu kabupaten atau suatu provinsi. **ysm/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perhutani Bisa Kerja Sama dengan Peternak Sapi



FOTO: ANU/PDT

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat meninjau wilayah PERHUTANI di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024).

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap PT Perhutani bisa bekerja sama dengan peternak Sapi dalam memanfaatkan wilayah hutan. Ia menjelaskan, sebanyak 80-90 persen susu sapi masih impor. Begitupun dengan daging sapi.

Hal itu diantaranya disebabkan karena menurunnya produksi susu dan daging dalam negeri. Padahal, Sudin bilang saat meninjau wilayah Perhutani di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (18/9), presiden terpilih mendatang mengusung program Makan Bergizi Gratis yang salah satunya

lewat pemberian susu gratis.

Keterbatasan wilayah bagi peternak sapi menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi susu dan daging dalam negeri. Terlebih beberapa waktu lalu banyak peternak yang kehilangan banyak sapi akibat PMK (penyakit mulut dan kuku). Sehingga menyebabkan kerugian bagi peternak, sekaligus menurunnya produksi susu dan daging dalam negeri.

“Untuk mencukupi kebutuhan susu dan daging dalam negeri saat ini memang tidak bisa hanya mengandalkan peternak, mengingat keterbatasan lahan dan pangan. Butuh campur tangan pemerintah.

Namun tidak hanya sekedar impor sapi perah. Apalagi dari Brazil yang dalam perjalanan ke Indonesia menggunakan kapal memakan waktu selama 30 hari. Butuh regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Dulu saya juga yang paling menentang impor kerbau,” paparnya.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap pemerintah, khususnya Perhutani, membantu para peternak lewat kerjasama pemanfaatan wilayah hutan perhutani. Hal itu tidak hanya untuk kepentingan peternak, tetapi juga kebutuhan susu dan daging dalam negeri. — **ayu/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Permudah Regulasi Ekspor Ikan Hias



FOTO: ULF/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah saat pertemuan tim di Bandung, Jawa Barat, Rabu, (18/9/2024).

Masih banyaknya kendala yang kerap dihadapi para pengusaha, terutama terkait regulasi dan proses ekspor yang masih rumit. Oleh karena itu peran pemerintah mendukung pengusaha sangat penting, khususnya di sektor budidaya ikan hias harus di perkuat.

Hal ini seharusnya difokuskan pada aspek operasional seperti pengembangan budidaya dan mencari pasar, sementara pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar

untuk mengatasi hambatan-hambatan, seperti proses karantina di bandara yang kerap menyulitkan pengiriman ekspor.

“Pemerintah perlu melihat potensi besar dari ikan hias di berbagai daerah di Indonesia. Di Papua, misalnya, ada banyak sekali jenis ikan hias yang belum diperkenalkan ke luar. Saya yakin, bersama para peneliti, kita bisa menemukan lebih banyak jenis ikan hias yang memiliki potensi ekspor besar,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah usai pertemuan tim di Bandung, Jawa Barat, Rabu, (18/9).

Bahwa saat ini pasar ikan hias

di Indonesia masih didominasi oleh jenis-jenis yang umum seperti ikan koi, sedangkan ikan hias dengan nilai tinggi, seperti arwana, masih jarang ditemui. Oleh karena itu, Sulaeman berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat lebih memperhatikan potensi ini di berbagai wilayah.

“Kita harus melihat secara menyeluruh potensi ikan hias di setiap daerah. Jika dikelola dengan baik, berbagai jenis ikan hias ini bisa dibudidayakan dan memberikan nilai tambah yang besar untuk kebutuhan ekspor,” jelasnya.

upi/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Tingkatkan Infrastruktur di KSPN Likupang-Manado



FOTO: ICA/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal saat memimpin Kunjungan Komisi V DPR RI ke Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (12/9/2024).

Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhammad Iqbal, meminta pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan juga transportasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya di Likupang, Sulawesi Utara. Ia pun mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah menunjang KSPN di Likupang lewat pembukaan jalan baru, pelebaran jalan, hingga pembanguan jembatan.

“Kementerian PUPR diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan KSPN ini mulai dari perencanaan hingga pembangunan infrastruktur

pendukungnya, termasuk renovasi atau rekonstruksi infrastruktur, kemudian *amenities* dan *event*, dan bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya, untuk promosi secara besar-besaran,” jelas Iqbal, di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (12/9).

Diketahui bahwa pemerintah telah mencanakan pembangunan lima KSPN Super Prioritas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Lima yang KSPN tersebut terdiri dari Danau Toba (Sumatra Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan

Bajo (NTT), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara).

Politisi Fraksi PPP itu pun menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai di kawasan Likupang guna meningkatkan minat wisatawan untuk datang ke KSPN, khususnya di Likupang, Sulawesi Utara. “Kementerian PUPR bisa bekerja sama dengan kementerian lain, terutama dengan Kementerian Pariwisata. Lalu untuk mengembangkannya, kita berharap agar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat bisa menarik investor ke KSPN, termasuk di Likupang,” papar Iqbal.

— ica/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pelabuhan Rakyat Dapat Kurangi Beban Jalan Darat



FOTO: MH/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat meninjau Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (12/9/2024).

Komisi V DPR RI sedang merevisi UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran. Salah satu agenda penting revisi adalah mengembangkan Pelayaran Rakyat (Pelra) yang akan membantu pelabuhan utama mengangkut barang dan jasa dengan kapal-kapal rakyat. Hal ini dinilai dapat mengurangi penggunaan jalan darat yang kerap rusak, karena beban angkutan yang berlebihan (*overload*).

“Kami sedang merevisi UU Pelayaran. Kita ingin menguatkan peran dari Pelayaran Rakyat (Pelra). Jadi, tolong bantulah mereka. Tadi ada

ide bagus, (kapal) *feeder* pakai pelra. Bongkar muat untuk peti kemasnya di sini (Pelabuhan Malundung), setelah itu pakai Pelra,” jelas Sigit Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat meninjau Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (12/9).

Ia melanjutkan, kendaraan angkutan barang dari pelabuhan yang melalui jalan-jalan nasional sering mengalami *overload* yang mengakibatkan kerusakan jalan. Sementara, kemampuan negara untuk merawat jalan-jalan tersebut belum memadai. Bila (angkutan) *feeder*-nya lewat Pelra menuju pelabuhan utama, maka infrastruktur jalan dapat terjaga

dengan baik.

Keberadaan Pelra, tambahnya, dapat membangkitkan ekonomi masyarakat lokal. Tinggal bagaimana otoritas pelabuhan, seperti Pelindo mendiskusikan pembangunan Pelra dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

“Di Provinsi Kalimantan Utara, ibu kotanya Bulungan. Masih ada sungai yang harus masuk. Nah, manfaatkan itu. Jadi, *feeder*-nya itu Pelra. Pelindo harus bantu. Membuat rakyat semakin sejahtera menghidupkan pelayaran rakyat. Dan kita sedang revisi melalui UU Pelayaran,” kata Politisi Fraksi PKS ini. —mh/rdn



Pertimbangkan Aspek Ekonomi dan Sosial

Dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, sejumlah anggota DPR dan tokoh industri membahas secara mendalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang dinilai berdampak besar terhadap industri tembakau di Indonesia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Subagyo, menekankan pentingnya kebijakan publik yang matang untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, kebijakan yang gagal akan membawa negara dalam bencana dan ketidakpercayaan publik. Firman juga mengkritik adanya peraturan pemerintah yang dianggap diskriminatif, terutama dalam konteks hak hidup dan kelangsungan industri tembakau.

“Hukum harus memenuhi rasa keadilan. Jika kebijakan publik gagal, negara akan menghadapi bencana



Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Subagyo, saat menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

besar. Rancangan peraturan ini harus dipastikan tidak diskriminatif,

terutama terhadap hak hidup para pelaku usaha di industri tembakau,” ujar Firman Subagyo di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Firman juga menyoroti posisi peraturan pemerintah dalam hierarki pembentukan undang-undang. Ia menekankan bahwa peraturan yang berada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, apalagi dengan konstitusi negara.

Selain itu, Firman mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya pasal-pasal “siluman” yang sering muncul di detik-detik akhir masa jabatan anggota DPR. Menurutnya, pasal-pasal tersebut berpotensi merusak kepentingan bangsa dan negara.



HUKUM HARUS MEMENUHI RASA KEADILAN. JIKA KEBIJAKAN PUBLIK GAGAL, NEGARA AKAN MENGHADAPI BENCANA BESAR. RANCANGAN PERATURAN INI HARUS DIPASTIKAN TIDAK DISKRIMINATIF, TERUTAMA TERHADAP HAK HIDUP PARA PELAKU USAHA DI INDUSTRI TEMBAKAU.

Firman Subagyo

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



ssb/aha

Berhak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak



FOTO : EOT/PDT

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Paten DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Rancangan Undang-undang tentang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) penting untuk segera dibahas karena para pekerja rumah tangga sebagai warna negara sesuai dengan amanat UUD 1945, memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Secara faktual, pekerja rumah tangga juga kerap mengalami diskriminasi, pelecehan, jam kerja yang tidak dibatasi.

“Para pekerja rumah tangga yang disadari atau tidak sampai hari ini membutuhkan dukungan dan pemihakan agar secara hukum

terlindungi, memiliki kedudukan hukum setara dan lebih mendapatkan kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia lainnya,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto dalam sambutannya saat membuka acara *Forum Group Discussion* dengan tema ‘Urgensi Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Para pekerja rumah tangga di Indonesia secara kuantitas tergolong tertinggi di dunia, sebagian besar merupakan Perempuan dengan jumlah 84 persen dan bahkan anak-anak sebesar 14 persen. Untuk itu pekerja

rumah tangga sangat rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang.

RUU PPRT diketahui telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada Tahun 2022 dan masuk kedalam RUU Prolegnas Tahun 2024. Wihadi sapaan akrabnya, berharap agar RUU PPRT dapat segera dibahas pada sisa masa periode keanggotaan DPR RI periode 2019-2024. Namun bila tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu, ia mendorong agar RUU PPRT menjadi salah satu RUU *carry over* yang diprioritaskan pembahasannya sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan pada periode 2024-2029.

— gal/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Sesuai Aturan Protokoler Kedewanan

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (21/9/). Agenda tersebut digelar guna memastikan pelayanan protokoler kedewanan di bandara diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perlu diketahui, penyediaan layanan keprotokolan di bandara bagi pimpinan dan anggota DPR RI termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) dan UU Keprotokolan serta Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Regulasi ini dibentuk untuk mendukung kerja kedewanan.

Oleh karena itu, Kunjungan Kerja BURT DPR RI merupakan bentuk pengawasan untuk memastikan pelayanan keprotokolan bandara telah memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 101 Ayat (3) huruf c yang menyatakan; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana



Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Nasril Bahar saat bertukar cenderamata disela-sela memimpin kunjungan Kerja ke Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (21/9/2024).

dimaksud dalam Pasal 100 huruf e, BURT dapat melakukan kunjungan

langsung pada obyek pengawasan.

Memimpin agenda, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Nasril Bahar menekankan agar PT Gapura Angkasa harus meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat tahun ini menjadi tahun penyambutan periode dewan yang baru. "Tahun ini, akan ada anggota dewan yang baru. PT Gapura Angkasa harus selalu meningkatkan pelayananan karena ini bagian dari hak protokol dan kami setara dengan pejabat publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Nasril saat memimpin agenda tersebut.



TAHUN INI, AKAN ADA ANGGOTA DEWAN YANG BARU. PT GAPURA ANGKASA HARUS SELALU MENINGKATKAN PELAYANAN KARENA INI BAGIAN DARI HAK PROTOKOL DAN KAMI SETARA DENGAN PEJABAT PUBLIK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Nasril Bahar

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI

um/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perjanjian Perdagangan Preferensial RI dan Serbia

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez, menerima kunjungan Marija Boškovi, *Charge d'Affairs* (diplomata perwakilan duta besar) dari Kedutaan Besar Serbia untuk Indonesia. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak membicarakan kerja sama ekonomi. Menurutnya dalam aspek ekonomi, Gilang menyebut Serbia sebagai salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Balkan Barat.

Ia memaparkan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Serbia dalam lima tahun terakhir tumbuh sebesar 13,03 persen, dengan total perdagangan mencapai USD 44,5 juta pada tahun 2023, meningkat 64,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Kami menghargai pencapaian ini dan perlu terus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan," ujarnya di Nusantara III, DPR



FOTO: MRI/PDT

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez, saat menerima kunjungan (H.E) Mrs. Marija Boškovi, Charge d'Affairs dari Kedutaan Besar Serbia untuk Indonesia, di DPR RI, Senayan.

RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Gilang juga mengusulkan pembentukan Perjanjian Perdagangan

Preferensial antara kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi, serta mengeksplorasi kerja sama di bidang ketahanan pangan mengingat krisis gandum akibat konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, ia menyoroti potensi kerja sama di bidang investasi, tenaga kerja migran Indonesia, serta pengembangan UMKM melalui program inkubasi bisnis dan inovasi.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan pentingnya hubungan antarmasyarakat kedua negara sebagai penopang utama hubungan bilateral. Ia mengapresiasi Dialog Antaragama Indonesia-Serbia (ISBID) yang telah berlangsung sejak tahun 2015, yang berperan strategis dalam mempromosikan pemahaman dan toleransi antar umat beragama di kedua negara.

ssb/rdn



NILAI PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN SERBIA DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR TUMBUH SEBESAR 13,03 PERSEN, DENGAN TOTAL PERDAGANGAN MENCAPAI USD 44,5 JUTA PADA TAHUN 2023, MENINGKAT 64,5 PERSEN DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA.



Gilang Dhielafararez

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Pemantapan pilar-pilar
kebangsaan bagi Calon
Anggota DPR RI dan DPD RI
Terpilih 2024 - 2029**

FOTO: JKA/PDT

